

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Natuna Pada triwulan II yang berlangsung dari bulan April sampai dengan bulan Juni Tahun 2026 mengalami fluktuasi harga yang cukup signifikan, hal ini bertepatan dengan Hari Besar Keagamaan Nasional yaitu Waisak dan Idul Adha. Berikut daftar harga barang kebutuhan pokok dan penting pada triwulan II di Kabupaten Natuna:

No	Komoditi	April	Mei	Juni	Perubahan Harga (%)
1	Beras	16,000	16,000	17,000	0.06
2	Gula	18,571	18,143	17,571	- 0.06
3	Minyak Goreng	20,500	20,571	20,357	- 0.01
4	Tepung Terigu	15,143	15,143	15,286	0.01
5	Daging	141,429	141,429	141,429	-
6	Telur Ayam Ras	60,857	58,500	59,000	- 0.03
7	Cabe Merah	69,615	73,462	72,923	0.05
8	Bawang Merah Jawa	42,789	42,357	41,429	- 0.03
9	Kacang Kedelai	13,200	13,200	13,333	0.01

Dari tabel diatas menunjukan harga barang kebutuhan pokok dan penting di Kabupaten Natuna tidak terjadi kenaikan harga pada komoditas beras, cabe merah, tepung terigu, dan kacang kedelai namun terjadi penurunan harga pada beberapa komoditas lainnya.

Bupati Natuna selaku Ketua TPID Kabupaten Natuna mendorong anggota TPID khususnya OPD untuk memperkuat dan mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui sinergi dan inovasi pada pilar 4K TPID, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Hal ini seiring dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Natuna No: 500/EKON-SDA/157/IV/2026 tentang Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah untuk Penanaman Cabai dan Sayuran dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan II tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Natuna menghadapi beberapa permasalahan dalam Pengendalian Inflasi Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Kabupaten Natuna Bukan Daerah Penghasil.

Kabupaten Natuna merupakan daerah terluar dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari banyak pulau dengan kondisi geografis yang tersebar memiliki tantangan dalam Pengendalian Inflasi Daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar daerah seperti Tanjungpinang, Batam, Jakarta dan Pontianak (Kalimantan Barat). Kondisi geografis tersebut menyebabkan harga pangan dan barang kebutuhan strategis di Kabupaten Natuna sangat rentan terhadap gangguan distribusi, tingginya biaya logistik, serta faktor cuaca yang kerap memengaruhi

kelancaran pasokan.

2. Kapasitas penyimpanan

Untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan, kebutuhan pokok masyarakat maka diperlukan dukungan infrastruktur berupa gudang disetiap Kecamatan di Kabupaten Natuna untuk mengantisipasi kendala ketersediaan pasokan ketika terjadi gangguan dalam pendistribusian barang dari daerah asal akibat jangka waktu pengiriman yang lama ataupun karena faktor cuaca.

3. HBKN

Seiring dengan HBKN Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Waisak yang bertepatan pada tanggal 27 Mei s/d 31 Mei 2026. Terjadi peningkatan harga dan berangsur turun pada akhir TW II di bulan Juni.

4. Kabupaten Natuna tidak termasuk daerah sentra produksi pangan strategis dimana hampir sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat masih dipasok dari luar daerah, sementara produksi lokal hanya terbatas pada beberapa komoditas tertentu dalam skala kecil seperti cabai dan hortikultura rumah tangga.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan berbagai kebijakan dan langkah strategis pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Pelaksanaan kebijakan difokuskan pada empat pilar utama, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Pasokan.

Pemerintah Kabupaten Natuna berupaya menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui:

- Penguatan koordinasi dengan daerah pemasok utama seperti Batam dan Tanjungpinang dan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat untuk menjamin kontinuitas pasokan pangan strategis.
- Dukungan terhadap peningkatan produksi pangan lokal melalui pemanfaatan lahan pekarangan, kegiatan pertanian terpadu, serta pengembangan komoditas hortikultura skala rumah tangga seiring dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Natuna No: 500/EKON-SDA/157/IV/2026 tentang Pemanfaatan Lahan Pekarangan Rumah untuk Penanaman Cabai dan Sayuran dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah.
- Melaksanakan Koordinasi terkait Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan penting di beberapa Kecamatan dan Pengawasan Bahan Pokok dan penting.
- Pasokan dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Kabupaten Natuna sampai dengan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 H dan hari Raya Waisak terpantau dalam kondisi aman dan mencukupi, serta harga relatif stabil meskipun terdapat beberapa komoditas yang mengalami fluktuasi namun masih dalam batas wajar.

Monitoring dan Koordinasi BBM di beberapa Kecamatan pada bulan April dan Juni 2026.

2. Keterjangkauan Harga.

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, kebijakan yang dilaksanakan meliputi:

- Pelaksanaan Bazar Pangan Murah dan Operasi Pasar Murah yang dilaksanakan di beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Selatan, Bunguran Tengah, Pulau Tiga Barat dan Kecamatan Pulau Laut..
- Pengawasan harga di pasar tradisional dan swalayan serta toko-toko untuk mencegah lonjakan harga yang tidak wajar.
- Fasilitasi stabilisasi harga komoditas tertentu melalui intervensi pasar bekerja sama dengan Bulog dan distributor.

3. Kelancaran Distribusi.

Untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan menekan biaya logistik, Pemerintah Kabupaten Natuna melaksanakan:

- Koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan dan pelaku usaha transportasi laut guna mengantisipasi gangguan distribusi akibat kondisi cuaca ekstrem dan libur sekoah.
- Pemantauan arus distribusi barang dari daerah pemasok ke pasar-pasar di Kabupaten Natuna.
- Upaya percepatan distribusi barang kebutuhan pokok pada saat terjadi keterlambatan pasokan akibat faktor alam.

4. Komunikasi Efektif.

Dalam mendukung efektivitas pengendalian inflasi, TPID Kabupaten Natuna memperkuat aspek komunikasi melalui:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Bupati Natuna yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2026 dengan penyampaian Pelaksanan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah yang telah dilaksanakan oleh setiap OPD.
- Pelaksanaan High Level Meeting TPID Tahun 2026 dengan Narasumber dari Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan di ruang rapat kantor Bupati Natuna pada tanggal 20 April 2026.
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyaluran BBM Kabupaten Natuna yang dipimpin oleh Bupati Natuna dilaksanakan pada Tanggal 30 April 2026 dalam rangka menjaga ketersediaan dan Penyaluran BBM Tahun 2026.
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Bupati Natuna Agenda Pembahasan Kuota BBM dengan Narasumber Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2026 di ruang rapat Kantor Bupati Natuna.
- Pelaksanaan koordinasi TPID untuk pelaksanaan Bazar Pangan Murah dan Operasi Pasar Murah serta mengevaluasi perkembangan harga dan pasokan yang dilaksanakan di beberapa Kecamatan.

Penguatan Data & Statistik Dashboard inflasi berbasis data TPID yang disampaikan setiap hari pada Website Kemendagri <https://wasinflasi.kemendagri.go.id/login> 20 komoditas utama.

- Penyampaian informasi harga dan ketersediaan barang kepada masyarakat melalui media informasi daerah.
- Edukasi kepada masyarakat terkait pola konsumsi bijak dan pemanfaatan produk lokal.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Rapat Koordinasi yang dilakukan tim TPID sudah sangat baik namun perlu dimaksimalkan. Pemerintah Daerah perlu memperkuat sinergi dengan seluruh pihak baik TNI, Polri, lembaga BUMD, BUMN dan pengusaha untuk bekerja sama dalam menekan inflasi daerah.
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Lokal dengan meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan serta meningkatkan penangkapan ikan, dan budidaya ikan. Masyarakat perlu dilakukan pendampingan untuk meningkatkan hasil pertanian dan perikanan, baik budidaya maupun tangkap.
3. Perlu dilakukan kerjasama dengan daerah lain untuk menampung hasil pertanian dan nelayan agar masyarakat memiliki daya dorong untuk semakin maju lagi dalam meningkatkan hasil pertanian dan perikanan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Natuna, maka merekomendasikan beberapa kebijakan Pengendalian Inflasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sebagai berikut :

1. Penguatan Koordinasi Distribusi Antarwilayah. Diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memperkuat koordinasi distribusi barang kebutuhan pokok antar kabupaten/kota, terutama dari daerah surplus ke Kabupaten Natuna, guna menjamin kelancaran pasokan dan stabilitas harga.
2. Dukungan Subsidi Transportasi dan Logistik. Pemerintah Provinsi dan Pusat diharapkan dapat memberikan dukungan subsidi transportasi laut/logistik untuk komoditas pangan strategis menuju wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Kabupaten Natuna, guna menekan biaya distribusi dan disparitas harga melalui subsidi angkutan laut.
3. Penguatan Peran Bulog di Daerah Terpencil. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat melalui Bulog untuk membangun gudang di beberapa Kecamatan terluar di Kabupaten Natuna seperti Serasan, Subi dan Pulau Laut dikarenakan kondisi geografis Natuna yang terdiri atas Pulau-pulau sehingga terbatasnya fasilitas penyimpanan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan pokok di wilayah perbatasan.
4. Peningkatan Infrastruktur Logistik dan Transportasi. Diperlukan percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi laut, pelabuhan, dan fasilitas logistik pendukung di wilayah Natuna guna memperlancar distribusi barang dan menurunkan biaya logistik.
6. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat mengalokasikan dukungan dana melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau untuk pembangunan fasilitas Cool Storage (pendingin dan penyimpanan) dalam menjaga kualitas hasil perikanan, pertanian maupun pangan segar lainnya tetap awet dan tidak cepat rusak.
7. Pemerintah Pusat diharapkan dapat mengintegrasikan Kabupaten Natuna ke dalam

◦

program nasional ketahanan pangan dengan pendekatan berbasis potensi lokal, sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi secara bertahap.

8. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait agar dapat melakukan kebijakan penurunan harga tiket pesawat menuju dan keluar Kabupaten Natuna, mengingat sangat tingginya harga tiket pesawat yang mencapai Rp2.800.000,00, sangat berdampak pada mahalnya biaya distribusi barang dan jasa sehingga berpotensi memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok.